



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk diintegrasikan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sehingga ada keselarasan antara kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dengan program prioritas Pemerintah Kota Semarang.

Dokumen Renstra dan Renja dipergunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah



(RKA OPD) yang setelah mendapatkan pengesahan dari DPRD Kota Semarang menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA OPD) yang terangkum dalam APBD Kota Semarang.

1.2. Landasan Hukum

Sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Menteri Keuangan Nomor : 28 Tahun 2010 Nomor : 0199/M PPN04/2010 Nomor : PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21);



17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 - 2025;
20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan; (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105);
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang;
23. Peraturan Walikota Nomor 1B Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
24. Peraturan Walikota Semarang Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta



Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

25. Peraturan Walikota Semarang Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 48)

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai suatu dokumen perencanaan, Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dimaksudkan sebagai penjabaran atas dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang 2016 - 2021.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah :

1. Merumuskan kebijakan program dan kegiatan dalam merencanakan pembangunan daerah berdasarkan atas evaluasi pembangunan tahunan yang telah berjalan, menelaah situasi saat ini dan membuat prediksi serta proyeksi pembangunan, dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang sesuai kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan selanjutnya sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud sesuai dengan tugas fungsi SKPD.
2. Sebagai analisis kinerja kebijakan pembangunan untuk satu tahun dalam kerangka evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD dan sebagai tolok ukur pertanggungjawaban Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) kepada Walikota.



3. Sebagai informasi kepada seluruh jajaran staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan dalam satu tahun yang mengacu pada RKPD Pemerintah Kota Semarang dan Renstra SKPD.

1.4. Sistematika Penyusunan

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat



BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Perangkat Daerah merupakan dasar utama bagi penyusunan rencana dan penganggaran tahunan dan rencana strategis jangka menengah daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah akan sangat menentukan kualitas rencana pembangunan daerah, untuk memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya maka perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan evaluasi atas pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Di bawah ini disajikan rekapitulasi evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan tahun berjalan sebagaimana Tabel 2.1.1 sebagai berikut :



Tabel 2.1.1
REKAPITULASI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1					WAJIB										
1	2	06			Kependudukan dan Catatan Sipil										
1	2	06	01		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	2	06	01		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	



Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	06	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas / operasional	100%	49 kend	49 kend	49 kend	100%	44 kend	44 kend	100%	
1	2	06	01	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan 15 gedung kantor	100%	15 gedung	15 gedung	15 gedung	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
1	2	06	01	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jenis peralatan kerja yang diperbaiki	100%	118 buah	118 buah	118 buah	100%	118 buah	118 buah	100%	
1	2	06	01	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang disediakan	100%	89 jenis	89 jenis	89 jenis	100%	59 jenis	59 jenis	100%	
1	2	06	01	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	persentase barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	24 jenis	24 jenis	24 jenis	100%	6 jenis	6 jenis	100%	



Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Gedung	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100%	8 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	10 jenis	10 jenis	100%	
1	2	06	01	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa sewa tanaman hias	100%	1 jenis	1 jenis	1 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%	
1	2	06	01	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan alat kebersihan yang disediakan	100%	29 jenis	29 jenis	29 jenis	100%	29 jenis	29 jenis	100%	
1	2	06	01	Penyediaan makanan dan minuman	makan dan minum RDK serta jamuan tamu yang disediakan	100%	1.330 dos	1.330 dos	1.330 dos	100%	1.880 dos	1.880 dos	100%	
1	2	06	01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang akan dilaksanakan	100%	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100%	92 OH	92 OH	100%	



Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	06	01	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	perjalanan dinas-dinas konsultasi / koordinasi dalam daerah	100%	0	0	0	100%	24 OH	24 OH	100%	
1	2	06	01	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	kegiatan penunjang administrasi perkantoran yang dilaksanakan diluar jam dan hari kerja	100%	0	0	0	0%	2.483 OK	2.483 OK	100%	
1	10	02		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	10	02	007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan gedung kantor yang akan diadakan	100%	27 buah	27 buah	27 buah	100%	43 buah	45 buah	100%	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 10 02 009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	perlengkapan gedung kantor yang akan diadakan	100%	15 buah	15 buah	15 buah	100%	21 buah	50 buah	100%	
1 10 02 010	Pengadaan Mebeleur	jenis mebeluer yang akan diadakan	100%	0	0	0	0	85 buah	84 buah	100%	
1 10 02 022	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara	100%	2 gedung	2 gedung	2 gedung	100%	2 gedung	2 gedung	100%	
1 10 02 024	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	48 kend	48 kend.	48 kend.	100%	45 kend	45 kend	100%	
1 10 02 026	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	72 buah	72 buah	72 buah	100%	4 kali	4 kali	100%	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 10 02 028	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	140 buah	140 buah	140 buah	100%	175 buah	185 buah	100%	
1 10 02 029	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur	mebeleur yang dipelihara	100%	113 buah	113 buah	113 buah	100%	30 buah	30 buah	100%	
1 10 05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Cakupan pelayanan peningkatan kapasitas SDM		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1 10 05 040	Pelatihan Peningkatan Mutu SDM	Jumlah peserta bintek / pelatihan peningkatan kompetensi SDM	0	110 peserta	110 peserta	110 peserta	100%	0	0	0%	
1 10 05 041	Bintek Keuangan	Bintek pengisian laporan tahunan pajak dan pengadministrasian pertanggungjawaban	0	25 peserta	25 peserta	25 peserta	100%	0	0	0%	



Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	06		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1	10	06	001	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disediakan	1 dokumen	100%	100%	100%	100%	0	0	0%	
1	10	06	004	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disediakan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	0	0	0%	
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah prognisis realisasi anggaran yang disediakan	1 dokumen	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	0	0	0%	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 10 06 006	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA SKPD	1 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100%	0	0	0%	
1 10 06 013	Penyusunan LAKIP	Jumlah LAKIP yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0%	
1 10 06 014	Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah Rancangan Renstra SKPD tahun 2015-2021	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0%	
1 10 06 018	Penyusunan LKPJ SKPD	jumlah LKPJ yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0%	
1 10 06 021	Penyusunan Renja SKPD	Jumlah RENJA yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0%	



Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	06	026	Penunjang kinerja PA, PPK, Bend dan Pembt Bend	waktu kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara	100%	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
				Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan	Jumlah RKA perubahan dan DPA perubahan yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0%	
				Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Jumlah RKA dan DPA yang disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	0	0	0%	
1	10	15		PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	391.385	377.925	346.955	346.955	100%	391.385	346.955	100%	
					Jumlah pengelolaan informasi data kependudukan	26	9	18	18	100%	26	18	100%	
					Jumlah pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan dan dokumen kependudukan	230	12	210	210	100%	230	210	100%	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 10 15 001	Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu	Jumlah penataan sistem koneksi jaringan SIAK	0	12 bln	12 bln	12 bln	100%	0	0	0%	
		Jenis aplikasi SIAK sesuai standar dan keluaran versi terbaru yang di tetapkan									
	Pelatihan Tenaga Pengelola Siak	Presentase tenaga pengelola SIAK yang sesuai kompetensi	80%	0	0	0	0%	0	0	0%	
		Jumlah pelatihan berbasis TIK bagi tenaga teknis pengelola SIAK	4 kali								
1 10 15 006	Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	Terselenggaranya pengolahan dan penyusunan informasi kependudukan	0	6 keg	6 keg	6 keg	100%	0	0	0%	



Kode				Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	15	007	Penyediaan Informasi Yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersedianya aplikasi desain database	0	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100%	0	0%	0%	
1	10	15	008	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah survey indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 kali	0	0	0	0%	0	0	0%	
					Jumlah penerbitan akta kematian	5440 akta	0	0	0	0%	0	0	0%	
					Jumlah penerbitan akta perkawinan dan perceraian	399500 anak	0	0	0	0%	0	0	0%	
					Jumlah bayi ber Akta Kelahiran	17484 anak	0	0	0	0%	0	0	0%	
					Jumlah kepemilikan akta kelahiran	1421580 akta	0	0	0	0%	0	0	0%	
					Jumlah pengurusan dan penerbitan suket pindah datang penduduk	34178 lembar	0	0	0	0%	0	0	0%	
					Jumlah pengurusan dan penerbitan SKTT, SKOT dan suket penduduk nonpermanen/rentan	20000 lembar	0	0	0	0%	0	0	0%	



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	15	009	Pengembangan Database Kependudukan	Jumlah pengurusan dan penerbitan suket pindah datang penduduk	34178 lembar	0	0	0	0%	0	0	0%		
					Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	296800 anak	0	0	0	0%	0	0	0%		
					Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK)	60500 lembar	0	0	0	0%	0	0	0%		
					Jumlah perekaman dan pencetakan KTP-el	145843 data	0	0	0	0%	0	0	0%		
					Pelayanan administrasi kependudukan pada hari besar / libur	6 hari	5 hari	5 hari	5 hari	100%	6 hari	5 hari	100%		
					Penyediaan ATK, formulir dan blanko pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, petugas pelayanan adminduk nonPNS, jasa survey.	0	0	0	0	0%	100%	100%	100%		
					Tersedianya database kependudukan yang terupdate	0	10.000 lbr	10.000 lbr	10.000 lbr	100%	0	0	0%		



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 10 15 010	Penyusunan Kebijakan Kependudukan	Tersusunnya Kebijakan Adminduk	0	1 Raperda	1 Raperda	1 Raperda	100%	0	0	0%	
1 10 15 011	Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil	Cakupan peningkatan kompetensi aparatur kependudukan dan catatan sipil	0	4 bln	4 bln	4 bln	100%	100%	100%	100%	
1 10 15 012	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan	0	35 peserta	35 peserta	35 peserta	100%	16 kec/ke	16 kec/ke	100%	
1 10 15 013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan	Pembinaan kinerja dan integritas pengelola adminduk	0	24 keg	24 keg	24 keg	100%	100%	100%	100%	
1 10 15 014	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah lokasi pelayanan yang dilakukan monitoring	0	16 TPDK	16 TPDK	16 TPDK	100%	0	0	0%	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 10 15 017	Pengembangan Sertifikasi SMM ISO 9001 : 2008	Peyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai standar ISO 9001	0%	1 paket	1 paket	1 paket	100%	6 bulan	6 bulan	100%	
1 10 15 021	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Kependudukan	Pengelolaan dan penataan arsip dokumen akta catatan sipil	94%	12 keg	12 keg	12 keg	100%	180.000 akta	180.000 akta	100%	
	Fasilitas Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah pelayanan non reguler penerbitan dokumen kependudukan	72 kali	0	0	0	0%	100%	100%	100%	
1 10 15 022	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan	Pelayanan langsung penerbitan dokumen kependudukan	0	0 kel	20	20	100%	0	0	0%	
1 10 15 026	Pembangunan Arsip Akta Catatan Sipil Elektronik	Penyajian dokumen arsip yang lebih aman, efisien dan mudah diakses	0	7700 data	7700 data	7700 data	100%	0	0	0%	



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 10 15 027	Penataan dan Pengelolaan Kinerja Tempat Perekam Data Kependudukan	Jumlah TPDK Kecamatan yang dikelola	0	16 TPDK	16 TPDK	16 TPDK	100%	16 TPDK	16 TPDK	100%	
1 10 15 028	Peningkatan Pengelolaan Registrasi Administrasi Kependudukan	Jumlah kinerja petugas registrasi	0	210.000 data	210.000 data	210.000 data	100%	0	0	0%	
1 10 15 022	Pengembangan dan Pembangunan Layanan Elektronik Kependudukan Berdasarkan TI	Jumlah pengembangan layanan TI	0	0	0	0	0%	1 paket	1 paket	100%	
1 10 18	Program Penataan Administrasi Pencatatan Sipil	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan									



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 10 18 001	Peningkatan Pengelolaan Registrasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan rasio kepemilikan akta kelahiran	0	100%	100%	100%	100%	0	0	0%	
		Penyelenggaraan pelayanan langsung (jempu bola) akta kelahiran bekerja sama dengan IBI	0	500 akta	500 akta	500 akta	100%	0	0	0%	
1 10 18 002	Peningkatan Pelayanan Akta Kematian	Peningkatan rasio kepemilikan akta kelahiran	0	100%	100%	100%	100%	0	0	0%	
		Pendataan, pendaftaran dan penertiban akta kematian	0	30 kel	30 kel	30 kel	100%	0	0	0%	
1 10 19	Program Penataan Administrasi Pendaftaran Penduduk			100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	
1 10 19 001	Peningkatan Pengelolaan Administrasi Penduduk Sementara	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan	0	100%	100%	100%	100%	0	0	0%	



Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2017			Target Program / Kegiatan Renja SKPD Berjalan (2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program / Kegiatan Renstra SKPD s/d Tahun 2018		Catatan
									Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat capaian	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	10	19	002		Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan	Pendataan dan pendaftaran penduduk tinggal sementara	0	6%	6%	6%	100%	0	0	0%	
						Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan	0	100%	100%	100%	100%	0	0	0%	
						Pelayanan mobil keliling KK, KTP-el, akta kelahiran dan akta kematian	0	760 dokumen	760 dokumen	760 dokumen	100%	0	0	0%	



2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik adalah indikator penting apakah penyelenggaraan kewenangan pemerintah dan aparatur sudah berjalan dengan baik. Dengan kata lain kualitas pelayanan publik adalah pertanda langsung tercapai atau tidaknya pemerintahan yang baik.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat diupayakan sebaik dan semaksimal mungkin sesuai visi yang ditetapkan menuju pelayanan prima. Upaya yang telah ditempuh adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, sarana dan prasarana kerja untuk pelayanan publik yang diharapkan akan membangun citra yang baik pada proses penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan. Pemerintah Daerah telah menetapkan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji dari penyelenggaran pelayanan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas bidang kependudukan dan catatan sipil yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Peraturan Walikota Semarang Nomor 1B Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Analisis kinerja pelayanan SKPD berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatantahun berjalan dapat kami sajikan pada Tabel 2.2.1 dan 2.2.2 dimana pencapaian kinerja pelayanan berdasarkan kondisi target menurut Renstra



SKPD dan capaian kinerja tahun lalu dan prediksi tahun berjalan, hitung proyeksi kebutuhan besaran target yang layak untuk tahun rencana dan prakiraan maju tahun berikutnya, maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

TABEL 2.2.1
REKAPITULASI HASIL PELAYANAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PERIODE TAHUN 2015 SAMPAI DENGAN 2017

No.	Uraian	2015	2016	2017	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan				
	Pengurusan Kartu Bukti Diri dan Akta-Akta Catatan Sipil				
	1) Kartu Keluarga (KK)	96.821	125.071	105.828	
	2) Kartu Tanda Penduduk (KTP)	113.401	109.574	74.736	
	3) Surat Keterangan Tempat Tinggal	607	738	1.018	
	4) Surat Keterangan Tinggal Sementara / Surat Keterangan Penduduk Non Permanen	589	488	1.076	
	5) Akta Kelahiran	31.634	34.884	44.180	
	6) Akta Kematian	2.512	9.245	12.696	
	7) Akta Perkawinan	1.329	1.217	1.253	
	8) Akta Perceraian	226	219	180	
	9) Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	115			
	10) Perubahan Kutipan Kedua dan Salinan Akta	1.393			
	11) Legalisasi Akta	157.890			
	13) Surat Keterangan Kependudukan	8.457	15.592		



TABEL 2.2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SEMARANG

No.	Indikator	SPP / SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	-----	90%	89,00%	90,00%	92,00%			95,46%				
2	Rasio bayi berakta kelahiran	-----	81%	79,77%	81,00%	89,29%	92,00%	93,00%	89,00%	92,78%	95,46%	94,00%	
3	Rasio pasangan berakta nikah (non muslim)	-----	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
4	Kepemilikan KTP	-----	90%	85,00%	90,00%	94,43%	94,00%	96,00%	95,46%	91,54%	94,94%	98,00%	
5	Kepemilikan Akta Kelahiran	-----	85%	80,00%	85,00%	79,00%	82,00%	84,00%	79,30%	77,14%	78,82%	86,00%	
6	Ketersediaan database kependudukan skala daerah	-----	Ada	Ada	Ada	Ada			Ada				
7	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	-----	Ada	Ada	Ada	Ada			Ada				
8	Rasio Keluarga ber KK	-----	100%	100%	100%	100%			100%				
9	Rasio Penduduk ber NIK	-----	100%	95%	100%	100%			100%				
10	Rasio Pasangan Cerai ber Akta Cerai	-----	100%	100%	100%	100%			100%				
11	Cakupan Penerbitan KK	100%	-----	100%	100%	100%			100%				



No.	Indikator	SPP / SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	Cakupan Penerbitan KTP_el	100%	-----	95%	100%	100%			95,46%				
13	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	90%	-----	92,37%	92,81%	86%			89,29%				
14	Cakupan Penerbitan Akta Kematian	70%	-----	31%	38%	44%			71,08%				
15	Rasio Penduduk Berakta Kematian	-----	-----			20%	85,00%	87,00%	71,07%	88,16%	96,12%	88,00%	
16	Kepemilikan KIA	-----	-----				25,00%	45,00%		2,00%	12,94%	70,00%	



2.3. Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Analisa isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana kerja SKPD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting/keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu diperlukan analisis terhadap fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu penting.

Adapun permasalahan/issue penting yang ada saat ini adalah sebagai berikut :

a. Administrasi Kependudukan

Dengan jumlah penduduk yang besar, Kota Semarang tentunya membutuhkan administrasi kependudukan yang terorganisir. Administrasi kependudukan dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan data informasi kependudukan. Administrasi Kependudukan menjadi semakin penting karena selalu bersentuhan dengan setiap



aktivitas kehidupan, diantaranya adalah saat pemilu legislatif, pemilu presiden, pemilu kepala daerah, mengurus surat-surat kendaraan, mengurus surat-surat tanah, dan lain sebagainya. Apabila kita akan berdomisili pada suatu wilayah maka kita harus memiliki tanda domisili yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan kependudukan melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dalam kebijakan ini, yang dimaksud dengan administrasi kependudukan adalah kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Seiring dengan perkembangannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menghadapi permasalahan-permasalahan ataupun isu-isu strategis dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai berikut :

- 1) Pengelolaan administrasi kependudukan berbasis single identification number yang bersifat nasional yang diterbitkan oleh diterbitkan oleh Kementrian dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jendral Administrasi Kependudukan berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Administrasi



Kependudukan, bahwa NIK menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik. Pemerintah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK. Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud diatas, pemerintah melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik paling lambat 5 (lima) tahun sejak Undang-undang tersebut disahkan. Ketentuan tentang NIK tersebut akan dijalankan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan pembangunan database kependudukan nasional, yang sangat erat kaitannya dengan keterbatasan kelembagaan, pendanaan, dan sumber daya manusia yang ada. NIK sangat bermanfaat jika sistem informasi kependudukannya dilaksanakan secara on line di seluruh Indonesia. Dengan diberlakukan identitas tunggal secara nasional akan memudahkan mengadministrasikan penduduk. Tertib administrasi kependudukan diharapkan terwujud dengan sistem ini dan sangat diperlukan mengingat besarnya jumlah penduduk kota Semarang. Dengan tertib administrasi, pemerintah kota Semarang diharapkan dapat lebih mudah memenuhi hak-hak warga negaranya. Ke depan, NIK dapat diakses oleh semua instansi adminduk sehingga tidak dimungkinkan lagi satu warga memiliki dua identitas atau lebih.

- 2) Perkembangan teknologi yang pesat dan derap langkah kehidupan yang cepat menuntut kemudahan layanan pemerintah dan bisnis sekaligus jaminan keamanan data identitas penduduk yang menerima layanan. KTP menjadi dasar bagi banyak layanan keseharian seperti layanan



perbankan, pembuatan SIM, asuransi kesehatan, penerbangan dan lainnya. Maraknya kasus kriminal dengan pelaku yang memiliki KTP palsu bahkan memiliki KTP ganda mendorong langkah-langkah yang lebih fokus pada perlindungan terhadap data pribadi yang sangat diperlukan untuk menekan penggunaan data pribadi dalam kriminalitas. Tentunya tidak diinginkan keamanan negara terganggu karena dimungkinkannya memperoleh KTP palsu dan ganda. Tetapi pada saat yang sama, KTP tetap mudah diperoleh dan digunakan secara sah oleh penduduk yang berhak atas KTP tersebut. Bahkan, KTP dapat berlaku secara nasional sehingga penduduk yang memerlukan mobilitas tinggi antar daerah tidak harus memiliki banyak KTP lokal. Pemerintah saat ini merancang sebuah sistem baru administrasi kependudukan. Modelnya sama dengan yang sudah diterapkan di negara-negara maju. Dengan sistem itu, seseorang tidak akan bisa punya KTP doble. Selain itu, KTP akan sulit dipalsukan, yaitu penerapan KTP_el. Penerapan KTP_el diarahkan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat pada perlindungan data pribadi. KTP_el didesain dengan metode autentikasi dan pengamanan data tinggi. Hal ini dapat dicapai dengan menanamkan chip di dalam kartu yang memiliki kemampuan autentikasi, enkripsi dan tanda tangan digital. Penerapan KTP_el di Kota Semarang dimulai tahun 2012 yang diawali dengan pemutakhiran data kependudukan dan pemberlakuan NIK nasional sebagai dasar pelaksanaan KTP_el. Penerapan awal KTP berbasis NIK Nasional yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip atau KTP_el merupakan langkah strategis menuju tertib



administrasi kependudukan yang mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dan terbangunnya basis data kependudukan yang lengkap dan akurat.

- 3) Sarana dan prasarana di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) Kecamatan masih ada yang tidak sesuai dengan standar untuk memenuhi kebutuhan pelayanan publik. Sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan dengan memperhatikan kebersihan, kesederhaaan, kelayakan dan kemanfaatan.
- 4) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan di TPDK kecamatan bertujuan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa administrasi kependudukan.
- 5) Sebagian masyarakat di beberapa wilayah tertentu berada jauh dari jangkauan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil yang dilakukan oleh TPDK kecamatan. Pelayanan perlu lebih diupayakan untuk lebih mendekat kepada masyarakat yang berada di wilayah tersebut. Pelayanan yang perlu disiapkan adalah pelayanan mobil keliling yang disediakan untuk warga yang kesulitan datang sendiri ke tempat pelayanan yang telah disediakan, baik karena jam kerja yang padat, maupun jarak yang jauh. Mobil yang memberi layanan itu akan mendatangi tempat-tempat yang strategis agar lebih mudah dijangkau warga. Dengan mendatangi pusat-pusat aktivitas warga, mobil keliling itu diharapkan dapat memberi pelayanan kependudukan yang prima. Sistem komputerisasi dalam mobil pelayanan keliling dirancang dengan menggunakan



teknologi Informasi sehingga pelayanan akan lebih cepat dan akurat. Pelayanan keliling diharapkan akan mengurangi keluhan masyarakat yang malas memperpanjang KTP.

b. Integritas

Paradigma pelayanan administrasi kependudukan mengarah pada pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik yaitu pelayanan publik yang meliputi: visi dan/atau misi serta motto pelayanan; sistem dan prosedur pelayanan; sumber daya manusia (SDM) pelayanan; sarana dan prasarana pelayanan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan publik sejak tahun 2009 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memperoleh sertifikat Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008. Selain itu pelayanan administrasi kependudukan di Kota Semarang telah masuk dalam zona hijau pelayanan publik yang penilaiannya dilakukan oleh Ombudsman RI. Lebih lanjut dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal sistem dan prosedur, sumber daya manusia pelayanan serta sarana dan prasarana pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik.

Demikian juga upaya pendayagunaan sumber daya manusia sebagai aparatur negara pada dasarnya adalah melalui pembinaan, penertiban dan penyempurnaan aparatur negara baik dari aspek kelembagaan, sumberdaya manusia aparatur, tatalaksana, dan pengawasan. Percepatan pendayagunaan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi dengan sasaran mengubah pola pikir (mindset), budaya kerja (culture-set), dan sistem manajemen pemerintahan, sehingga



peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat tercapai. Dalam pengelolaan kependudukan kendala-kendala yang sering ditemui antara lain masih lemahnya sumber daya manusia pengelola kependudukan terutama di tataran bawah yang merupakan ujung tombak pengelola kependudukan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang penguasaan teknologi dan administrasi kependudukan yang terus mengalami perkembangan seiring dengan berubahnya peraturan perundang-undangan membutuhkan perhatian yang serius. Upaya peningkatan sumber daya manusia diupayakan melalui kursus-kursus singkat di bidang penguasaan teknologi administrasi kependudukan yang terkini antara lain SIAK online dan melakukan bimbingan teknis maupun pelatihan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengenai peraturan perundang-undangan dan pengelolaan administrasi kependudukan demi terwujudnya pelayanan prima. Kebijakan pengembangan pegawai dalam rangka peningkatan keterampilan/profesionalisme pegawai dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna layanan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap SKPD untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap SKPD dalam menyiapkan rancangan Renja SKPD. Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan indikatif untuk tahun yang direncanakan.



Di dalam penyusunan rancangan awal RKPD dilakukan review usulan program dan kegiatan SKPD dari usulan tahun lalu dan prioritas pembangunan untuk tahun rencana, kajian terhadap RKP, analisis isu strategis dan prioritas pembangunan daerah untuk tahun yang direncanakan bersama para pemangku kepentingan yang terkait, merumuskan rancangan awal RKPD, dan pembahasan rancangan awal RKPD dengan SKPD.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam menyusun Renja Tahun 2019 telah melakukan review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Semarang Tahun 2019 yang ditelaah dalam tabel 2.4.1 berikut ini :



TABEL 2.4.1
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2019
KOTA SEMARANG

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				9.280.343.000					9.280.343.000	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.433.693.000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	2.433.693.000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	747.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	747.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend	Dinas	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	21.150.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kend	Dinas	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	21.150.000	
3	Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas	waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan 15 gedung kantor	100%	574.170.000	Dinas/Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Dinas	waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan 15 gedung kantor	100%	574.170.000	
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas	jenis peralatan kerja yang diperbaiki	100%	80.550.000	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Dinas	jenis peralatan kerja yang diperbaiki	100%	80.550.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas	persentase barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	152.592.000	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Dinas	persentase barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	152.592.000	
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	alat tulis kantor yang disediakan	100%	148.650.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas	alat tulis kantor yang disediakan	100%	148.650.000	
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100%	44.045.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan	100%	44.045.000	
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	penyediaan jasa sewa tanaman hias	100%	51.450.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas	penyediaan jasa sewa tanaman hias	100%	51.450.000	
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	bahan dan alat kebersihan yang disediakan	100%	92.866.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas	bahan dan alat kebersihan yang disediakan	100%	92.866.000	
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas	makan dan minum RDK serta jamuan tamu yang disediakan	100%	41.650.000	Penyediaan Makanan dan Minuman	Dinas	makan dan minum RDK serta jamuan tamu yang disediakan	100%	41.650.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang akan dilaksanakan	100%	187.250.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang akan dilaksanakan	100%	187.250.000	
12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas	perjalanan dinas-dinas konsultasi / koordinasi dalam daerah	100%	21.600.000	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Dinas	perjalanan dinas-dinas konsultasi / koordinasi dalam daerah	100%	21.600.000	
13	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas	kegiatan penunjang administrasi perkantoran yang dilaksanakan diluar jam dan hari kerja	100%	270.720.000	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	Dinas	kegiatan penunjang administrasi perkantoran yang dilaksanakan diluar jam dan hari kerja	100%	270.720.000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.717.772.000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	100%	1.717.772.000	
14	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Dinas	perlengkapan gedung kantor yang akan diadakan	100%	60.350.000	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Dinas	perlengkapan gedung kantor yang akan diadakan	100%	60.350.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Dinas	perlengkapan gedung kantor yang akan diadakan	100%	432.382.000	Pengadaan Peralatan gedung kantor	Dinas	perlengkapan gedung kantor yang akan diadakan	100%	432.382.000	
16	Pengadaan Mebeleur	Dinas	jenis mebeluer yang akan diadakan	100%	191.015.000	Pengadaan Mebeleur	Dinas	jenis mebeluer yang akan diadakan	100%	191.015.000	
17	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Dinas	gedung kantor yang dipelihara	100%	298.600.000	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Dinas	gedung kantor yang dipelihara	100%	298.600.000	
18	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas	kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	471.780.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Dinas	kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	100%	471.780.000	
19	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas & TPDK Kec.	perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	111.450.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Dinas & TPDK Kec.	perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	100%	111.450.000	
20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas & TPDK Kec.	peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	152.195.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Dinas & TPDK Kec.	peralatan gedung kantor yang dipelihara	100%	152.195.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	366.900.000	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tertib Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	100%	366.900.000	
21	Penunjang Kinerja, PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Dinas	waktu kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	100%	325.600.000	Penunjang Kinerja, PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	Dinas	waktu kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu	100%	325.600.000	
22	Penyusunan Lkpj Skpd	Dinas	jumlah LKPJ yang disediakan	1 dokumen	3.500.000	Penyusunan Lkpj Skpd	Dinas	jumlah LKPJ yang disediakan	1 dokumen	3.500.000	
23	Penyusunan Lakip	Dinas	Jumlah LAKIP yang disediakan	1 dokumen	2.300.000	Penyusunan Lakip	Dinas	Jumlah LAKIP yang disediakan	1 dokumen	2.300.000	
24	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Dinas	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disediakan	1 dokumen	6.000.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Dinas	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disediakan	1 dokumen	6.000.000	
25	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disediakan	1 dokumen	5.500.000	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Dinas	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disediakan	1 dokumen	5.500.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah prognisis realisasi anggaran yang disediakan	1 dokumen	2.500.000	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Dinas	Jumlah prognisis realisasi anggaran yang disediakan	1 dokumen	2.500.000	
27	Penyusunan Renja Skpd	Dinas	Jumlah RENJA yang disediakan	1 dokumen	6.500.000	Penyusunan Renja Skpd	Dinas	Jumlah RENJA yang disediakan	1 dokumen	6.500.000	
28	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan	Dinas	Jumlah RKA perubahan dan DPA perubahan yang disediakan	2 dokumen	7.500.000	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan	Dinas	Jumlah RKA perubahan dan DPA perubahan yang disediakan	2 dokumen	7.500.000	
29	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Dinas	Jumlah RKA dan DPA yang disediakan	2 dokumen	7.500.000	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Dinas	Jumlah RKA dan DPA yang disediakan	2 dokumen	7.500.000	
	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	402.190 lembar	4.761.978.000	Program Penataan Administrasi Kependudukan		Jumlah penerbitan dokumen kependudukan	402.190 lembar	4.761.978.000	
			Jumlah pengelolaan informasi data kependudukan	31 elemen data				Jumlah pengelolaan informasi data kependudukan	31 elemen data		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu	Dinas	Jumlah pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan dan dokumen kependudukan Jumlah penataan sistem koneksi jaringan SIAK Jenis aplikasi SIAK sesuai standar dan keluaran versi terbaru yang di tetapkan	230 lembaga 17 lokasi 6 versi	7.728.000	Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu	Dinas	Jumlah pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan dan dokumen kependudukan Jumlah penataan sistem koneksi jaringan SIAK Jenis aplikasi SIAK sesuai standar dan keluaran versi terbaru yang di tetapkan	230 lembaga 17 lokasi 6 versi	7.728.000	
31	Pelatihan Tenaga Pengelola Siak	Dinas	Presentase tenaga pengelola SIAK yang sesuai kompetensi Jumlah pelatihan berbasis TIK bagi tenaga teknis pengelola SIAK	80% 4 kali	43.250.000	Pelatihan Tenaga Pengelola Siak	Dinas	Presentase tenaga pengelola SIAK yang sesuai kompetensi Jumlah pelatihan berbasis TIK bagi tenaga teknis pengelola SIAK	80% 4 kali	43.250.000	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Dinas	Jumlah survey indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 kali	4.362.000.000	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Dinas	Jumlah survey indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 kali	4.362.000.000	
			Jumlah penerbitan akta kematian	5440 akta				Jumlah penerbitan akta kematian	5440 akta		
			Jumlah penerbitan akta perkawinan dan perceraian	399500 anak				Jumlah penerbitan akta perkawinan dan perceraian	399500 anak		
			Jumlah bayi ber Akta Kelahiran	17484 anak				Jumlah bayi ber Akta Kelahiran	17484 anak		
			Jumlah kepemilikan akta kelahiran	142158 0 akta				Jumlah kepemilikan akta kelahiran	1421580 akta		
			Jumlah pengurusan dan penerbitan suket pindah datang penduduk	34178 lembar				Jumlah pengurusan dan penerbitan suket pindah datang penduduk	34178 lembar		
			Jumlah pengurusan dan penerbitan SKTT, SKOT dan suket penduduk nonpermanen/rentan	20000 lembar				Jumlah pengurusan dan penerbitan SKTT, SKOT dan suket penduduk nonpermanen/rentan	20000 lembar		



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Kependudukan	Dinas	Jumlah pengurusan dan penerbitan suket pindah datang penduduk Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK) Jumlah perekaman dan pencetakan KTP-el Pengelolaan dan penataan arsip dokumen akta catatan sipil	34178 lembar 296800 anak 60500 lembar 145843 data 94%	125.000.000	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Kependudukan	Dinas	Jumlah pengurusan dan penerbitan suket pindah datang penduduk Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK) Jumlah perekaman dan pencetakan KTP-el Pengelolaan dan penataan arsip dokumen akta catatan sipil	34178 lembar 296800 anak 60500 lembar 145843 data 94%	125.000.000	
34	Fasilitas Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dinas	Jumlah pelayanan non reguler penerbitan dokumen kependudukan	72 kali	224.000.000	Fasilitas Penerbitan Dokumen Kependudukan	Dinas	Jumlah pelayanan non reguler penerbitan dokumen kependudukan	72 kali	224.000.000	



2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat diakomodir melalui proses Musrenbang kabupaten/kota. Musrenbang kabupaten/kota adalah musyawarah para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan RKPD kabupaten/kota berdasarkan Renja SKPD hasil forum SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD. Prinsip-prinsip penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten/Kota adalah memperhatikan hasil pembahasan forum SKPD atau forum gabungan SKPD, hasil musrenbang kecamatan, RPJMD atau Renstra Daerah (bagi daerah yang belum melakukan Pilkada), hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun berjalan dan masukan dari para peserta.

Keluaran dari pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota adalah kesepakatan tentang rumusan yang menjadi masukan utama untuk memutakhirkan rancangan RKPD dan rancangan Renja SKPD, yang meliputi penetapan arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan pagu indikatif menurut fungsi/SKPD.

Untuk Adapun hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat melalui kegiatan Musrenbang tingkat kota disajikan dalam tabel 2.5.1 sebagai berikut :



TABEL 2.5.1
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU
KEPENTINGAN TAHUN 2019
KOTA SEMARANG

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	<u>NIHIL</u>				



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan nasional adalah upaya seluruh komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jalan perubahan adalah jalan ideologis yang bersumber pada Proklamasi, Pancasila 1 Juni 1945, dan Pembukaan UUD 1945. Proklamasi dan Pancasila 1 Juni 1945 menegaskan jatidiri dan identitas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Pembukaan UUD 1945 dengan jelas mengamanatkan arah tujuan nasional dari pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan.

Upaya mewujudkan tujuan negara dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 menetapkan bahwa visi pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR.

Sejalan dengan keberlanjutan pembangunan yang telah dirancang dalam RPJPN 2005-2025, periode pembangunan 2015-2019 merupakan masa pembangunan yang strategis dalam



mempersiapkan landasan pembangunan yang kuat bagi pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang tahap ke-4 di tahun 2020-2025. Untuk itu, Pemerintah telah menyusun RPJMN 2015-2019 dengan mengangkat Visi “TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”.

Dalam rangka mendukung Agenda Prioritas Pembangunan Nasional, serta pencapaian Visi dan Misi Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan arah Kebijakan dan Strategi khususnya di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu meningkatkan kualitas dan kemanfaatan *database* kependudukan nasional, melalui strategi:

- a. Penyediaan *database* kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat.
- b. Pemanfaatan NIK, *database* kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan.
- d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Prioritas program dalam rangka mendukung arah pembangunan nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dilaksanakan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sbb :



No	Tema	Program Prioritas Nasional	Sasaran Kegiatan
1	Revolusi Mental	Daya rekat sosial dalam rangka kemajemukan	Pemenuhan akta kelahiran untuk anak
2	Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi	Akses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau sebagai dasar penerbitan dokumen serta penyediaan informasi untuk pelayanan publik

Operasionalisasi Arah Kebijakan dan Strategi Kemendagri pada tahun 2018 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran yang memuat di dalamnya dukungan Kemendagri atas pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), Program Quick Wins, dan Prioritas K/L. Adapun program yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung prioritas tersebut dilaksanakan pada Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pokok-pokok kebijakan Kementerian Dalam Negeri dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu :

- a. Penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal



- b. Meningkatkan pemanfaatan NIK, Database Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna Pusat
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota
- d. Penyediaan DP4 untuk Mendukung Penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada Serentak
- e. Jumlah Kab/Kota dalam pengelolaan KTP-el berbasis NIK dengan perekaman sidik jari
- f. Jumlah Kab/Kota yang database kependudukan yang tersambung (online) dengan Provinsi dan Nasional
- g. Terpenuhinya Sarpras SIAK di daerah dan data center kependudukan
- h. Jumlah Kab/Kota yang terpenuhi operasionalisasi SIAK dan database kependudukan berbasis nomor induk kependudukan (NIK) nasional secara online
- i. Jumlah daerah yang terfasilitasi bimbingan teknis pendampingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan Sistem informasi Administrasi kependudukan
- j. Jumlah Kepemilikan Cakupan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 18 Tahun
- k. Terpenuhinya Blangko KTP-el untuk daerah
- l. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
- m. Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen, informasi untuk pelayanan publik
- n. Pengendalian dan Pengamanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan



Permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan ke depan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu, masalah yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data dan informasi kependudukan, sampai saat ini data kependudukan belum dimanfaatkan secara optimal untuk pelayanan publik, terbatasnya SDM daerah dalam pengelolaan SIAK, masih terbatasnya dukungan pemerintah daerah dalam penerapan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan administrasi kependudukan yang akan dicapai pada tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Tersedia dan termanfaatkannya data dan informasi kependudukan;
2. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan; dan
3. Tertatanya peraturan pelaksana dan peraturan lainnya di bidang administrasi kependudukan.

Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2018, maka arah kebijakan pembangunan bidang administrasi kependudukan adalah peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu ditekankan pada penyediaan data kependudukan; penyediaan hasil kajian kependudukan; dan peningkatan cakupan registrasi vital dengan mendorong pemberian NIK kepada setiap penduduk dan menyelenggarakan koneksitas



data kependudukan, serta penyusunan dan penyesuaian peraturan pelaksana dan peraturan daerah dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Beberapa hal pokok yang perlu ditindak lanjuti di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkaitan dengan kebijakan strategis nasional adalah :

1. Dalam rangka pengembangan SAK terpadu adalah penerapan KTP elektronik dengan indikator kabupaten/kota melaksanakan perekaman biodata, foto dan sidik jari penduduk.
2. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan indikator Kementerian/Lembaga dan kabupaten/kota yang koneksitas Kementerian/Lembaga telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan data *warehouse* NIK Nasional
3. Tersusunnya dokumen lainnya yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga yang telah mengembangkan data *warehouse* berbasis data kependudukan dengan NIK Nasional untuk peningkatan pelayanan publik.

Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2019, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan kependudukan tahun 2019 diprioritaskan pada meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu, melalui: (a) Penyediaan data kependudukan yang akurat dan tepat waktu dari berbagai sumber, antara lain melalui registrasi penduduk; (b) Peningkatan cakupan registrasi vital dan pengembangan registrasi vital terpadu; (c) Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber kepada seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah



maupun masyarakat untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan maupun dunia usaha; (d) Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi, seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan; (e) Peningkatan kapasitas SDM data dan informasi kependudukan; dan (f) Peningkatan sistem teknologi informasi data kependudukan.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tertib administrasi kependudukan dengan pelayanan prima menuju perluasan sistem layanan elektronik (e_service) yang didukung data kependudukan yang akurat dan terpercaya.

Sedangkan sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2019 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada pelayanan prima melalui peningkatan kompetensi, pengembangan sistem dan perluasan akses pelayanan publik.
3. Meningkatnya kualitas penyajian data kependudukan berskala daerah yang akurat dan terpercaya untuk memenuhi semua kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal berbasis teknologi informatika.

3.3 Program dan Kegiatan

Didalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana



Program kegiatan tahun 2019. Program dan kegiatan dimaksud disusun sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
- c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
- d. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- e. Penyediaan alat tulis kantor
- f. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- i. Penyediaan peralatan rumah tangga
- j. Penyediaan makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah
- l. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- m. Belanja jasa penunjang administrasi perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- b. Pengadaan peralatan gedung kantor
- c. Pengadaan mebeleur
- d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- e. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- f. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
- g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
- h. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur



3. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan.

Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Penunjang Kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara
- b. Penyusunan LKPJ SKPD
Penyusunan LAKIP
- c. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- d. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- e. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- f. Penyusunan Reanjan SKPD
- g. Penyusunan RKA Perubahan dan DPA Perubahan
- h. Penyusunan RKA SKPD dan DPA SKPD

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

Terdiri dari kegiatan sebagai berikut :

- a. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu
- b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan
- c. Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil
- d. Peningkatan kapasitas pengelolaan dokumen kependudukan
- e. Pengembangan sistem administrasi kependudukan (SAK) terpadu

Rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tahun 2019 tersebut diatas beserta prakiraan maju tahun 2020 dirinci sebagaimana tabel 3.3.1 berikut ini:



TABEL 3.3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2019 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2020
KOTA SEMARANG

Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.06.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.280.343.000			7.879.689.000
01.02.06	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				9.280.343.000			7.879.689.000
1.2.06.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		100%	2.433.693.000		100%	2.508.689.000
1.2.06.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	747.000.000		100%	758.080.000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%			100%	



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.06.01.006	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	21.150.000		100%	14.420.000
		kendaraan dinas/ operasional yang diperpanjang perizinannya	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%			100%	
1.2.06.01.008	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan 15 Gedung kantor.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	574.170.000		100%	603.188.600
1.2.06.01.009	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	jenis peralatan kerja yang diperbaiki.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	80.550.000		100%	82.966.500
1.2.06.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	alat tulis kantor yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	152.592.000		100%	188.148.555
1.2.06.01.011	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase barang cetak dan penggandaan yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	148.650.000		100%	150.496.390



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.06.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik/penerangan bangunan yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	44.045.000		100%	45.366.350
1.2.06.01.013	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	penyediaan jasa sewa tanaman hias.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	51.450.000		100%	90.382.500
1.2.06.01.014	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	bahan dan alat kebersihan yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	92.866.000		100%	93.015.180
1.2.06.01.017	Penyediaan Makanan Dan Minuman	makan dan minuman RDK serta jamuan tamu yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	41.650.000		100%	42.899.500
1.2.06.01.018	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang akan dilaksanakan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	187.250.000		100%	109.718.000
1.2.06.01.028	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	perjalanan dinas dinas konsultasi / koordinasi dalam daerah	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	21.600.000		100%	4.200.000



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.06.01.154	Belanja Jasa Penunjang Administrasi Perkantoran	kegiatan penunjang administrasi perkantoran yang dilaksanakan diluar jam dan hari kerja.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	270.720.000		100%	44.259.100
1.2.06.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Cakupan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur		100%	1.717.772.000		100%	1.475.781.000
1.2.06.02.007	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan Gedung kantor yang akan diadakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	60.350.000		100%	186.280.650
1.2.06.02.009	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	peralatan gedung kantor yang akan diadakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	432.382.000		100%	180.456.000
1.2.06.02.010	Pengadaan Mebeluer	jenis mebeluer yang akan diadakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	191.015.000		100%	47.086.450
1.2.06.02.022	Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor	gedung kantor yang dipelihara.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	298.600.000		100%	121.643.000



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.06.02.024	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional	kendaraan dinas / operasional yang dipelihara.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	471.780.000		100%	353.989.370
1.2.06.02.026	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	perlengkapan gedung kantor yang dipelihara.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	111.450.000		100%	97.335.000
1.2.06.02.028	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	peralatan gedung kantor yang dipelihara.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	152.195.000		100%	135.208.100
1.2.06.06	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Tertib pelaporan capaian kinerja dan keuangan		100%	366.900.000		100%	312.489.000
1.2.06.06.005	Penunjang Kinerja Pa, Ppk, Bendahara Dan Pembantu	waktu kinerja PA, PPK, Bendahara dan Pembantu Bendahara	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	100%	325.600.000		100%	238.638.000
1.2.06.06.006	Penyusunan Lkjp Skpd	Jumlah LKPJ yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	3.500.000		1 dokumen	3.605.000



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.06.06.010	Penyusunan Lakip	Jumlah LAKIP yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	2.300.000		1 dokumen	3.605.000
1.2.06.06.014	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Skpd	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	6.000.000		1 dokumen	7.725.000
1.2.06.06.020	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	5.500.000		1 dokumen	12.875.000
1.2.06.06.023	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah prognosis realisasi anggaran yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	2.500.000		1 dokumen	3.605.000
1.2.06.06.028	Penyusunan Renja Skpd	Jumlah RENJA yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 dokumen	6.500.000		1 dokumen	19.467.000
1.2.06.06.033	Penyusunan Rka Perubahan & Dpa Perubahan	Jumlah RKA perubahan dan DPA perubahan yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2 dokumen	7.500.000		2 dokumen	8.034.000



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.06.06.034	Penyusunan Rka Skpd Dan Dpa Skpd	Jumlah RKA dan DPA yang disediakan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2 dokumen	7.500.000		2 dokumen	7.725.000
1.2.06.15	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah penerbitan dokumen kependudukan		402.190 lembar	4.761.978.000		410.000 lembar	3.582.730.000
		Jumlah Pengelolaan informasi data kependudukan		31 elemen data			35 elemen dat	
		Jumlah pemanfaatan NIK, KTP-el, data kependudukan dan dokumen kependudukan		230 lembaga pengguna			250 lembaga pengguna	
1.2.06.15.001	Pembangunan Dan Pengoperasian Siak Secara Terpadu	Jumlah penataan sistem koneksi jaringan SIAK.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17 lokasi	7.728.000		17 lokasi	36.050.000
		Jenis aplikasi SIAK sesuai standar dan keluaran versi terbaru yang ditetapkan.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6 versi			6 versi	
1.2.06.15.002	Pelatihan Tenaga Pengelola Siak	Persentase tenaga pengelola SIAK yang sesuai kompetensi	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	80%	43.250.000		85%	36.050.000



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah pelatihan berbasis TIK bagi tenaga teknis pengelola SIAK.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4 kali			4 kali	
1.2.06.15.008	Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	Jumlah survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1 kali	4.362.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anak Pemberdayaan Lansia penyandang disabilitas	1 kali	1.760.173.620
		Jumlah penerbitan akta kematian	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5440 akta		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anak Pemberdayaan Lansia penyandang disabilitas	5.950 akta	
		Jumlah penerbitan akta perkawinan dan perceraian	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1480 akta		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anak Pemberdayaan Lansia penyandang disabilitas	1.494 akta	



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 - 18 tahun	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	399500 anak		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anak Pemberdayaan Lansia penyandang disabilitas	408.900 anak	
		Jumlah bayi ber Akta Kelahiran	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17484 anak		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anak Pemberdayaan Lansia penyandang disabilitas	17.670 anak	
		Jumlah kepemilikan akta kelahiran	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1421580 akta		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anak Pemberdayaan Lansia penyandang disabilitas	1.454.640 akta	
		Jumlah pengurusan dan penerbitan SKTT, SKOT dan suket penduduk nonpermanen/rentan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	20000 lembar		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anak Pemberdayaan Lansia penyandang disabilitas	25.000 lembar	



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
		Jumlah pengurusan dan penerbitan suket pindah datang penduduk.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	34178 lembar		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anakPemberdayaan Lansia penyangang disabilitas	35.886 lembar	
		Jumlah kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	296800 anak		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anakPemberdayaan Lansia penyangang disabilitas	381.600 anak	
		Jumlah penerbitan Kartu Keluarga (KK)	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	60500 lembar		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anakPemberdayaan Lansia penyangang disabilitas	66.550 lembar	
		Jumlah perekaman dan pencetakan KTP-el.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	145843 data		Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anakPemberdayaan Lansia penyangang disabilitas	160.427 data	



Kode	OPD/ Urusan/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Kerja Tahun 2019			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
		Program/ Kegiatan	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1.2.06.15.021	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dokumen Kependudukan	Pengelolaan dan penataan arsip dokumen akta catatan sipil	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	94%	125.000.000		95%	91.800.000
1.2.06.15.031	Fasilitasi Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah pelayanan non reguler penerbitan dokumen kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	72 kali	224.000.000	Terkait Pemberdayaan perempuan Pemberdayaan anak Pemberdayaan Lansia penyandang disabilitas	72 kali	188.551.800
J U M L A H					9.280.343.000			7.879.689.000



B A B I V

P E N U T U P

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Tahun 2019 untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja SKPD disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Tahun 2016 – 2021 yang merupakan dokumen lima tahunan bagi pelaksanaan program-program pembangunan SKPD untuk lima tahun kedepan yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Renja SKPD merupakan bagian dari Renstra SKPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Semarang.

4.1 Kesimpulan

Dari uraian pada Bab-bab sebelumnya beberapa hal yang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019 disusun berdasarkan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi (Renstra) yang dilaksanakan oleh Dinas melalui berbagai kegiatan tahunan.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam upaya ikut mendorong tercapainya visi dan misi Kota Semarang telah menyiapkan program dan kegiatan tahun anggaran 2019 yang menunjang peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik bidang administrasi kependudukan dengan mengutamakan pendekatan lokasi pelayanan kepada masyarakat antara lain kegiatan peningkatan kepemilikan dokumen kependudukan dan



pelayanan keliling. Selain itu peningkatan pelayanan publik juga diarahkan pada peningkatan sarana pelayanan yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan pada masyarakat pemohon.

c. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan jumlah kepemilikan KTP_el diupayakan dengan meningkatkan jumlah perekaman KTP_el melalui pelayanan perekaman langsung ke rumah bagi penduduk yang tidak mampu datang ke tempat perekaman (sakit, lansia jompo dan difabel) yang mengajukan permohonan, melaksanakan perekaman bagi wajib KTP_el pemula di sekolah dan melaksanakan pelayanan langsung di kelurahan. Selain itu peralatan pencetakan KTP_el yang dimiliki jumlahnya masih kurang, sehingga perlu untuk memperkuat dan meningkatkan kapasitas pencetakan KTP_el yang akan diajukan usulan penambahan sarana peralatan pencetakan KTP_el beserta sarana pendukungnya dalam APBD 2019.
- 2) Meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran diupayakan dengan melaksanakan kerjasama penerbitan dan pemutakhiran data kepemilikan akta kelahiran dengan lembaga / instansi yang terkait, melaksanakan pelayanan langsung di kelurahan dan memberikan pembebasan denda retribusi penerbitan akta kelahiran pada tahun 2019 dengan menerbitkan Keputusan Walikota Semarang.
- 3) Meningkatkan kepemilikan KIA diupayakan dengan melaksanakan pelayanan KIA di Dinas dan 16 (enambelas) TPDK Kecamatan dan melaksanakan paket pelayanan KIA bagi pemohon akta kelahiran tidak terlambat. Selanjutnya untuk meningkatkan kapasitas pencetakan KIA akan



mengusulkan penambahan peralatan cetak KIA beserta sarana pendukungnya dalam APBD 2019.

- d. Kegiatan pelayanan mobil keliling bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sasaran masyarakat yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari tempat pelayanan administrasi kependudukan dan pusat-pusat keramaian yang mudah dijangkau oleh masyarakat pemohon administrasi kependudukan khususnya bagi warga miskin di daerah tersebut dapat membantu menekan tingkat keterlambatan permohonan administrasi kependudukan sehingga dapat meringankan biaya administrasi yang harus dibayarkan.

4.2 Hambatan / Kendala

Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang saat ini antara lain :

- a. Belum optimalnya kepemilikan dokumen kependudukan yang belum sesuai target yang ditetapkan antara lain pada kepemilikan KTP_el dan kepemilikan akta catatan sipil.
- b. Kurangnya kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan baik di dalam masyarakat maupun di lingkungan aparatur penyelenggara pelayanan. Jika lingkungan tersebut terbentuk maka diharapkan akan membentuk lingkungan yang baik menuju tertib administrasi kependudukan.
- c. Pelayanan di 5 (lima) TPDK Kecamatan menempati bangunan yang kurang representatif dibandingkan TPDK Kecamatan lainnya yang sudah menempati gedung sendiri, yaitu di TPDK Kecamatan Gajahmungkur, Candisari, Semarang Tengah, Gayamsari dan Tugu, sehingga mengakibatkan pelayanan menjadi kurang nyaman.



- d. Kurang optimalnya manajemen kinerja pelayanan mengakibatkan banyaknya jumlah pengaduan. Hal ini perlu disikapi dengan pembenahan dan penataan serta pengelolaan sumber daya yang terlibat baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, metode dan sistim yang diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang dapat menjamin kelancaran dan kecepatan proses pelayanan selanjutnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan jumlah kepemilikan KTP_el diupayakan dengan meningkatkan jumlah perekaman KTP_el melalui pelayanan perekaman langsung ke rumah bagi penduduk yang tidak mampu datang ke tempat perekaman (sakit, lansia jompo dan difabel) yang mengajukan permohonan, melaksanakan perekaman bagi wajib KTP_el di dinas dan TPDK Kecamatan dan melaksanakan pelayanan langsung di kelurahan. Untuk meningkatkan kapasitas pencetakan KTP_el diupayakan dengan menambah jumlah mesin cetak serta menambah pelayanan pencetakan di TPDK Kecamatan.
 - 2) Meningkatkan jumlah kepemilikan akta kelahiran diupayakan dengan melaksanakan kerjasama penerbitan akta kelahiran dengan Rumah Sakit dan IBI, melaksanakan pelayanan langsung di kelurahan dan memberikan pembebasan denda retribusi penerbitan akta kelahiran.



- b. Membangun ekosistem pemerintahan yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Kesadaran tersebut ditunjukkan dengan 4 hal, yakni kesadaran akan pentingnya dokumen kependudukan, pentingnya pemanfaatan data kependudukan, pentingnya pemutakhiran data kependudukan, dan pentingnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan rakyat. Dengan membangun ekosistem tersebut diharapkan akan terbangun pemerintahan dan masyarakat yang sadar akan pentingnya administrasi kependudukan. Dalam penerapannya, 1 kecamatan minimal harus terbentuk 1 desa/kelurahan sadar Adminduk, 1 kabupaten/kota minimal terbentuk 1 kecamatan sadar Adminduk, dan 1 provinsi minimal terbentuk 1 kabupaten/kota sadar Adminduk. Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya Indonesia yang sadar administrasi kependudukan, sehingga terwujud tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
- c. TPDK Kecamatan merupakan tempat pelayanan administrasi kependudukan yang terdekat dapat diakses oleh masyarakat yang diharapkan akan memberikan kemudahan dalam pelayanan. Penyediaan sarana gedung kantor TPDK Kecamatan yang representatif akan memberikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat pemohon maupun bagi petugas yang melayani. Terdapat 5 (lima) TPDK Kecamatan yang belum menempati gedung sendiri yaitu TPDK Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Gayamsari, Semarang Tengah dan Semarang Tengah yang selanjutnya akan diusulkan secara bertahap pada periode Renstra 2016-2021.



- d. Perbaikan penyelenggaraan pelayanan akan didorong untuk meningkatkan kepuasan masyarakat, antara lain melalui :
- 1) Perbaikan prosedur pelayanan yang lebih memberikan kemudahan pada masyarakat.
 - 2) Memperluas akses pelayanan selain dengan penyediaan tempat-tempat pelayanan yang dekat dengan masyarakat juga menyediakan pelayanan berbasis web (online) untuk akta kelahiran, akta kematian dan KTP_el. Selanjutnya pelayanan online akan ditingkatkan untuk pelayanan administrasi kependudukan lainnya.
 - 3) Menyediakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang memenuhi kriteria pelayanan administrasi kependudukan yang baik.
 - 4) Penanganan Pengaduan yang baik untuk mempercepat penyelesaian pengaduan masyarakat

Keberhasilan pelaksanaan Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sangat tergantung pada komitmen dan konsistensi serta peran aktif seluruh pemangku kepentingan guna menjamin terwujudnya tujuan dan sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Semarang, 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA SEMARANG

Drs. ADI TRI HANANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 196111211985031007